

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Fenomena politik uang kerap mewarnai dinamika demokrasi, terutama saat penyelenggaraan pemilihan umum. Secara garis besar, praktik politik uang bisa didefinisikan sebagai upaya memengaruhi keputusan politik seseorang atau sekelompok orang melalui pemberian uang, barang, layanan, atau keuntungan material lainnya. Tindakan ini umumnya dijalankan oleh calon politisi atau pihak yang memiliki kepentingan demi mengamankan dukungan selama proses pemilihan.¹⁴

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, politik uang merupakan bentuk transaksi politik antara kandidat atau biasa disebut dengan tim sukses dan pemilih. Dalam transaksi ini, pemilih bersedia memberikan dukungan politiknya sebagai balasan atas imbalan materi yang mereka dapatkan. Dalam konteks ini, hubungan antara kandidat dan pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional mengenai visi, program kerja, atau kapabilitas kepemimpinan

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, *Politik Uang Dalam Pemilu 2014 Studi Kasus Jakarta Utara* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum kota administrasi Jakarta Utara, 2015),3-4

kandidat, melainkan lebih pada keuntungan material bersifat jangka pendek.¹⁵

Frederic Charles Schaffer menjelaskan bahwa politik uang atau *vote buying* merupakan praktik yang terjadi ketika para peserta tim suksesnya kerap memberikan sejumlah uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memperoleh dukungan suara. Tindakan semacam ini bukan hanya merusak integritas proses pemilihan umum, melainkan juga memperkuat berkembangnya budaya politik yang bersifat transaksional di tengah masyarakat.¹⁶

Dari sudut pandang hukum di Indonesia, politik uang adalah tindakan terlarang karena berpotensi merusak prinsip keadilan dalam pemilu. Politik uang dianggap sebagai manipulasi politik yang menghilangkan kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya secara rasional dan mandiri.¹⁷ Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, kesimpulan yang ditarik bahwa politik uang merupakan praktik yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat melalui pemberian materi. Akibatnya, keputusan politik tidak lagi berlandaskan pertimbangan rasional dan nilai-nilai demokrasi yang sehat.

¹⁵ Edward Aspinall and Mada Sukmajati, *Patronase Dan Klientelisme Dalam Politik Elektoral Di Indonesia, Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014, 2015*, 10-11

¹⁶ Frederic Charles Schaffer, *Pemilu untuk Dijual: Penyebab dan Dampak Jual Beli Suara* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2007), 7-9.

¹⁷ Dewi Safitri et al., "Analisis Potensi Pelanggaran HAM Pada Kasus Politik Uang (Money Politics) Pemilu Dalam Perspektif Kajian Politik Hukum," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 4, no. 1 (2025): 137.

2. Bentuk-bentuk Praktik Politik Uang

Praktik politik uang dapat muncul dalam beragam wujud, muncul secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Ini seringkali disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat serta strategi yang diterapkan kandidat untuk meraih dukungan. Salah satu bentuk yang paling lazim adalah pemberian uang secara langsung kepada pemilih. Praktik ini umumnya terjadi menjelang hari pemungutan suara dan dikenal dengan istilah “serangan fajar”. Dalam praktik ini, tim sukses atau pihak pendukung kandidat membagikan sejumlah uang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memilih calon tertentu. Selain pemberian uang tunai secara langsung, politik uang juga bisa dilakukan melalui pemberian barang atau bantuan materi.¹⁸ Barang yang diberikan dapat berupa sembako, pakaian, peralatan rumah tangga, atau kebutuhan pokok lainnya. Dalam beberapa kasus, pemberian barang ini dilakukan dalam acara sosial yang seolah-olah tidak berhubungan dengan politik, namun sebenarnya bertujuan memengaruhi pilihan pemilih.

Bentuk lain dari politik uang adalah penyediaan bantuan sosial atau fasilitas tertentu bagi masyarakat. Misalnya, seorang kandidat

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, “Serangan Fajar Pemilu: Pengertian, Bentuk, Dampak, Dan Sanksinya,” *KPU Kabupaten Yalimo*, last modified 2025, accessed March 25, 2026, https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8117_serangan-fajar-pemilu-pengertian-bentuk-dampak-dan-sanksinya#:text=Serangan fajar adalah praktik politik,dilarang secara hukum di Indonesia.

memberikan dukungan untuk pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, atau bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu. Meskipun bantuan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, namun jika dilakukan dengan niat memengaruhi pilihan politik, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk politik uang. Politik uang bisa terwujud lewat janji politik yang berbentuk materi. Kandidat bisa menjanjikan berbagai bentuk bantuan atau proyek pembangunan kepada masyarakat jika mereka terpilih. Janji-janji semacam ini seringkali dimanfaatkan untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa politik uang tidak selalu terjadi secara terang-terangan. Dalam banyak situasi, praktik ini dilakukan secara terselubung melalui berbagai bentuk bantuan atau kegiatan sosial yang sesungguhnya memiliki tujuan politis.¹⁹

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang

Praktik politik uang merupakan hasil dari proses yang terbentuk melalui kebiasaan dan kondisi sosial politik yang berkembang dalam masyarakat. Hubungan timbal balik antara kandidat dan pemilih, harapan masyarakat terhadap pemberian materi menjelang pemilu, serta pola kampanye yang berorientasi pada bantuan atau hadiah menjadi faktor yang mendorong praktik ini terus berlangsung. Ketika

¹⁹ Fathur Rozy et al., "Praktik Politik Uang Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 7, no. 1 (2020): 37.

kebiasaan tersebut dibiarkan, politik uang semakin dianggap sebagai hal yang wajar dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, Gereja Toraja menegaskan sikap menolak politik uang karena bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Gereja mendorong jemaat menggunakan hak pilih secara bijaksana berdasarkan hati nurani dan integritas, serta tidak terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang demi kepentingan politik agar kehidupan demokrasi berjalan sehat dan bermartabat.²⁰ Di tengah masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi, pemberian uang atau bantuan materi dari calon politisi seringkali dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan secara langsung.²¹

Faktor lain yang turut berperan adalah budaya politik pragmatis. Dalam budaya politik yang pragmatis, masyarakat cenderung memandang politik sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan praktis. Pemilih tidak terlalu memerhatikan visi atau program kerja kandidat, melainkan lebih tertarik pada manfaat langsung yang dapat mereka peroleh.²² Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat juga menjadi salah satu penyebab maraknya praktik politik

²⁰ Gereja Toraja, *Pokok-Pokok Ajaran Gereja Toraja (PPAGT)* (Rantepao: Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 2016), 181–183.

²¹ Rifqi Fadhlurrahman, “Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas,” *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 20–27.

²² Burhanuddin Muhtadi, *Buku Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kepustakaan Ppopuler Gramedia (KPG), 2020).234

uang. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang bersih dan adil membuat sebagian masyarakat tidak menyadari dampak negatif praktik politik uang terhadap kehidupan politik dan sosial. Strategi kandidat juga menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dibiarkan dalam meraih kemenangan pemilu. Persaingan politik yang semakin ketat seringkali mendorong kandidat untuk menggunakan berbagai cara demi mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk melalui praktik politik uang.²³

4. Dampak Politik Uang dalam Kehidupan Sosial

Implikasi dari politik uang tidak sebatas pada tahapan pemilihan umum, namun juga memiliki efek luas pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak utamanya adalah menurunnya kualitas demokrasi.²⁴ Ketika pemilih menentukan pilihan berdasarkan imbalan materi, maka proses demokrasi tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat secara murni. Di samping itu, politik uang juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan politik. Kandidat yang memiliki sumber daya keuangan lebih besar berpeluang tinggi

²³ Inka Nusamuda Pratama, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia," *Seminar Nasional LPPM UMMAT 1* (2022): 761–767.

²⁴ KPU Provinsi Papua Pengunungan, "Politik Uang Dalam Pemilu: Pengertian, Penyebab, Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *KPU Provinsi Papua Pengunungan*, last modified 2024, accessed March 27, 2026, https://paupegunungan.kpu.go.id/blog/read/1068_politik-uang-dalam-pemilu-pengertian-penyebab-dampak-dan-upaya-pencegahannya#:~:text=Politik uang berdampak besar terhadap,modal politik%27%20setelah terpilih.

agar memenangkan pemilu berbeda dengan kandidat dimana mengandalkan kualitas program dan kepemimpinan.

Dampak lain yang dihasilkan dari praktik politik uang ialah munculnya budaya korupsi di dalam pemerintahan. Kandidat yang terpilih melalui praktik politik uang seringkali berusaha untuk mengembalikan biaya politik yang telah mereka gunakan selama proses kampanye. Hal ini dapat memacu terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Politik uang juga dapat merusak nilai-nilai moral di masyarakat. Ketika masyarakat terbiasa menerima uang atau materi sebagai imbalan atas pilihan politik mereka, maka integritas dan tanggung jawab moral dalam kehidupan politik menjadi semakin lemah.²⁵

B. Politik dan Gereja

1. Gereja sebagai Persekutuan (Koinonia)

Dalam tradisi Kristen, gereja dipahami sebagai komunitas umat beriman yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup bersama dalam iman kepada Yesus Kristus. Kata gereja sendiri berasal dari bahasa Yunani, *ekklesia* yang berarti kumpulan atau jemaat orang yang terpanggil

²⁵ Agustinus Abraham, "Money Politics Sebagai Akar Permasalahan Demokrasi Indonesia: Tinjauan Pada Pemilu 2019 Dan 2024," *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia* 2, no. 4 (2025): 108–119.

keluar.²⁶ Persekutuan gereja tidak hanya berkaitan dengan kegiatan ibadah, tetapi juga meliputi interaksi sosial di antara anggota jemaat. Dalam kehidupan bergereja, setiap anggota jemaat didorong untuk hidup dalam kasih, saling mendukung, dan membangun satu sama lain.

2. Hubungan Politik dan Gereja

Hubungan antara gereja dan politik merupakan hal yang sulit dihindari karena gereja hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sistem politik. Jemaat gereja juga merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, gereja tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, gereja diharapkan dapat memberikan pendidikan moral dan politik kepada jemaat agar mereka mampu menentukan pilihan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Gereja juga dapat berperan sebagai suara moral dalam masyarakat dengan mengingatkan para pemimpin politik agar menjalankan tugasnya dengan integritas dan tanggung jawab. Dengan demikian, keterlibatan gereja dalam kehidupan sosial

²⁶ Martha Tesalonika et al., "Doktrin Gereja : Eklesiologi," *Jurnal Magistra* 2, no. 3 (2024): 188–197.

dan politik lebih bersifat moral dan etis, bukan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan.²⁷

3. Dampak Politik Uang terhadap Persekutuan Jemaat

Persekutuan jemaat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan gereja. Dalam tradisi Kristen, persekutuan jemaat dikenal dengan istilah *koinonia*, yaitu hubungan persaudaraan yang didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus serta nilai kasih, kejujuran, dan saling membangun. Persekutuan ini bukan hanya terlihat dalam kegiatan ibadah bersama, tetapi juga dalam kehidupan sosial di antara anggota jemaat yang saling mendukung dan menjaga kebersamaan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, gereja tidak terlepas dari berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya. Salah satu fenomena yang dapat memengaruhi kehidupan persekutuan jemaat adalah praktik politik uang. Ketika praktik politik uang masuk ke dalam kehidupan masyarakat yang juga merupakan anggota gereja, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi hubungan sosial dan kualitas persekutuan di antara anggota jemaat. Adapun dampak yang terjadi dalam persekutuan yaitu:

²⁷ Gerli Safira Petonengan et al., "Kajian Teologis Gereja Dan Politik: Analisis Transformasi Hubungan Dan Keterlibatan Kontemporer," *THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual* 1, no. 1 (2024): 43–57.

a. Munculnya Konflik dalam Jemaat

Salah satu dampak yang sering muncul akibat praktik politik uang adalah munculnya konflik di antara anggota jemaat. Dalam masa pemilihan umum, anggota jemaat sering kali memiliki pilihan politik yang berbeda-beda.²⁸ Perbedaan pilihan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun ketika pilihan politik tersebut dipengaruhi oleh praktik politik uang, dan adanya sistem kekeluargaan maka perbedaan tersebut dapat memicu konflik. Praktik politik uang ini dapat menciptakan kelompok-kelompok dalam jemaat yang saling mendukung kandidat tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan di antara anggota jemaat, terutama jika masing-masing kelompok merasa bahwa pilihan politik mereka adalah yang paling benar. Akibatnya, hubungan persaudaraan yang sebelumnya terjalin dengan baik dapat terganggu oleh perbedaan kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, konflik yang muncul tidak hanya terjadi secara terbuka, tetapi juga dalam bentuk ketegangan sosial yang tersembunyi. Anggota jemaat mungkin tetap berinteraksi dalam kegiatan gereja, tetapi hubungan mereka tidak lagi dilandasi oleh rasa saling percaya dan kebersamaan yang tulus.

²⁸ Samuel Sihite et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Permasalahan Money Politik Dan Dampaknya Di Dusun I Kamboja, Desa Laut Dendang," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (December 9, 2023): 28090–28097, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11298>.

b. Menurunnya Kepercayaan antar Anggota Jemaat

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam kehidupan persekutuan gereja. Tanpa adanya kepercayaan, hubungan sosial dalam jemaat akan menjadi rapuh dan mudah mengalami konflik. Praktik politik uang dapat mengurangi tingkat kepercayaan di antara anggota jemaat karena menimbulkan kecurigaan dan prasangka.²⁹ Misalnya, ketika ada anggota jemaat yang diketahui menerima uang atau bantuan materi dari kandidat tertentu, anggota jemaat lainnya mungkin mulai mempertanyakan motivasi di balik pilihan politiknya. Hal ini dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap individu tersebut dan mengganggu hubungan sosial di dalam jemaat. Selain itu, praktik politik uang juga dapat menimbulkan anggapan bahwa pilihan politik seseorang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan moral atau nilai-nilai iman, tetapi semata-mata pada keuntungan materi. Kondisi ini dapat memperlemah rasa saling percaya yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan persekutuan gereja.

c. Melemahnya Nilai-nilai Kekristenan dalam Kehidupan Jemaat

Gereja mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi

²⁹ Andina Aulia Ramadhani, "Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi Di Indonesia," *Lentera Ilmu* 2, no. 1 SE-Articles (March 26, 2025): 76–85, <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/view/79>.

pedoman bagi setiap anggota jemaat dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik. Namun praktik politik uang dapat bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.³⁰ Ketika anggota jemaat terlibat dalam praktik politik uang, baik sebagai penerima maupun sebagai bagian dari tim kampanye yang membagikan uang kepada masyarakat, hal ini dapat melemahkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral yang diajarkan oleh gereja. Politik uang mendorong sikap pragmatis yang lebih mengutamakan keuntungan materi daripada integritas moral. Jika kondisi ini dibiarkan, maka nilai-nilai Kekristenan yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan jemaat dapat semakin terpinggirkan. Gereja tidak lagi menjadi komunitas yang menekankan integritas dan kejujuran, tetapi dapat terpengaruh oleh tindakan politik yang menyimpang dari nilai-nilai etika.

d. Menurunnya Partisipasi dalam Kehidupan Gereja

Dampak lain dari praktik politik uang terhadap persekutuan jemaat adalah menurunnya partisipasi anggota jemaat dalam kegiatan gereja. Penurunan partisipasi ini secara khusus mulai terlihat pada sebagian anggota PPGT (Pemuda Gereja Toraja) dan Kaum Bapak, yang merupakan kelompok yang cukup aktif dalam

³⁰ Almas Ghaliya Putri Sjafrina, "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 43–53, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.

dinamika sosial dan politik di masyarakat, Kesibukan dalam aktivitas politik praktis, relasi sosial-politik, serta keterlibatan dalam jaringan dukungan kandidat membuat perhatian dan waktu mereka lebih banyak terserap ke dalam kegiatan politik dibandingkan kegiatan gerejawi. Akibatnya, kegiatan persekutuan seperti ibadah, pelayanan, dan kegiatan sosial gereja dapat mengalami penurunan partisipasi. Selain itu, jika gereja dianggap tidak mampu menjaga netralitas atau tidak memberikan arahan moral yang jelas mengenai praktik politik yang sehat, maka kepercayaan jemaat terhadap gereja sebagai lembaga moral juga dapat menurun.³¹

e. Terganggunya Komunikasi dalam Persekutuan Jemaat

Persekutuan jemaat pada dasarnya dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan jujur di antara anggota jemaat. Melalui komunikasi yang sehat, jemaat dapat saling berbagi pengalaman, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang lebih kuat sebagai satu komunitas iman. Adapun dampak lanjutan dari konflik tersebut sampai ke merusak komunikasi dalam jemaat yang menyebabkan ada anggota jemaat yang memilih untuk pindah ke jemaat lain. Ketika hubungan sosial dipengaruhi oleh

³¹ Karwanto Oktofianus Hohakay et al., "Peran Gereja Masehi Injili Di Halmahera Dalam Pendidikan Politik Bagi Anggota Jemaat," *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen* 6, no. 1 (2024): 27–40.

kepentingan politik dan ekonomi, komunikasi di antara anggota jemaat dapat menjadi tidak terbuka. Anggota jemaat mungkin merasa enggan untuk menyampaikan pendapat mereka secara jujur karena khawatir menimbulkan konflik.³²

C. Teori Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas

1. Pengertian Rasionalitas Komunikatif

Teori rasionalitas komunikatif merupakan salah satu konsep penting yang dikembangkan oleh filsuf dan sosiolog Jerman, Jurgen Habermas. Teori ini merupakan bagian dari pemikiran Habermas mengenai bagaimana masyarakat modern seharusnya membangun hubungan sosial yang sehat melalui komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi. Habermas mengemukakan bahwa kehidupan sosial manusia pada dasarnya dibangun melalui proses komunikasi, di mana individu saling bertukar gagasan untuk mencapai pemahaman bersama.³³

Menurut Habermas, rasionalitas komunikatif adalah bentuk rasionalitas yang muncul dalam proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan (*mutual understanding*). Dalam komunikasi yang rasional, setiap individu memiliki kesempatan yang

³² Melda Tiana, "Studi Kasus Iklan Layanan Masyarakat Bawaslu, Ditinjau Dari Aspek Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Tolak Politik Uang," *Jurnal Visart: Jurnal Seni Rupa Dan Desain* 02, No. 01 (2024): 11–23.

³³ Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif: Vol.1 Rasio Dan Rasionalitas Masyarakat* (Yogyakarta, Indonesia: Kreasi Wacana, 2006).25-30

sama untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan argumen, serta mempertanyakan argumen orang lain secara terbuka dan jujur. Dengan demikian, komunikasi tidak digunakan sebagai alat untuk memanipulasi atau mendominasi orang lain, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan rasional. Habermas menjelaskan bahwa komunikasi yang ideal harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Semua pihak yang terlibat dalam komunikasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dalam kondisi seperti ini, keputusan yang dihasilkan dari proses komunikasi akan lebih mencerminkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu.³⁴

Dalam konteks kehidupan sosial, rasionalitas komunikatif sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara anggota masyarakat. Melalui komunikasi yang rasional dan terbuka, masyarakat dapat menyelesaikan berbagai konflik dan perbedaan pendapat secara damai serta mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Tindakan Komunikatif dan Tindakan Strategis

Dalam teorinya, Habermas membedakan dua bentuk tindakan fenomena-fenomena sosial yang kerap muncul di tengah-tengah

³⁴ Ibid.35-40

kehidupan komunitas, yakni tindakan komunikatif dan tindakan strategis yaitu:

- a. Tindakan komunikatif, adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama melalui komunikasi yang rasional. Dalam tindakan komunikatif, individu tidak berusaha untuk memanipulasi orang lain melainkan berusaha membangun kesepahaman melalui dialog yang terbuka dan jujur. Tujuan utama dari tindakan komunikatif adalah terciptanya kesepakatan yang didasarkan pada argumen yang logis serta dapat disepakati oleh seluruh pihak.
- b. Tindakan strategis, adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu dengan memanfaatkan orang lain sebagai sarana dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam tindakan strategis, komunikasi sering kali digunakan sebagai alat untuk memengaruhi atau memanipulasi orang lain agar mereka bertindak sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan strategis sering terlihat dalam praktik-praktik politik yang mengutamakan kemenangan atau kepentingan kekuasaan daripada dialog rasional dengan masyarakat. Salah satu contoh dari tindakan strategis ini adalah praktik politik uang, di mana kandidat politik berusaha memperoleh dukungan masyarakat melalui pemberian uang atau

materi lainnya. Jika dilihat dari perspektif teori Habermas, praktik politik uang menunjukkan bahwa proses komunikasi politik tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kesepahaman bersama, melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan strategis tertentu.³⁵

3. Konsep Ruang Publik

Salah satu konsep penting dalam pemikiran Habermas adalah konsep ruang publik (*public sphere*). Ruang publik adalah ruang sosial di mana masyarakat dapat berkumpul untuk berdiskusi, bertukar pendapat, serta mengkaji berbagai persoalan yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Ruang publik yang ideal, setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Diskusi yang terjadi dalam ruang publik seharusnya didasarkan pada argumen yang rasional dan terbuka sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Namun dalam kenyataannya, ruang publik sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Dominasi kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik dapat mengganggu proses komunikasi yang seharusnya berlangsung secara bebas dan rasional. Ketika hal ini terjadi, ruang publik tidak lagi menjadi tempat dialog yang sehat, tetapi berubah menjadi arena

³⁵ Ibid.335

persaingan kepentingan yang didominasi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.³⁶

Dalam konteks praktik politik uang, ruang publik dapat mengalami distorsi karena proses komunikasi politik tidak lagi berlandaskan pada dialog wajar, tetapi pada pertukaran kepentingan material. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan pilihan politik mereka secara logis.

D. Relevansi Teori Rasionalitas Komunikatif dalam Penelitian

Teori rasionalitas komunikatif Jurgen Habermas menjadi kerangka teoritis yang penting dalam penelitian ini karena membantu menjelaskan bagaimana praktik politik uang dapat memengaruhi hubungan sosial dalam komunitas gereja. Dalam kehidupan persekutuan jemaat, komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai merupakan unsur penting untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara anggota jemaat. Namun praktik politik uang dapat mengganggu proses komunikasi tersebut karena hubungan sosial di antara anggota jemaat menjadi dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Ketika komunikasi di dalam jemaat tidak lagi didasarkan pada upaya untuk mencapai kesepakatan bersama, tetapi

³⁶ Pradana, Fransiskus Gilang Agcira "Rasionalitas Komunikatif Menurut Jürgen Habermas Dalam Bab I Buku The Theory Of Communicative Action Vol.1" 1 (2026). 12-31

lebih pada kepentingan strategis tertentu, maka kualitas persekutuan jemaat dapat mengalami penurunan.

Melalui perspektif teori Habermas, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana praktik politik uang memengaruhi komunikasi sosial dalam kehidupan jemaat serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas persekutuan gereja. Melalui pemanfaatan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan yang jauh lebih mendalam terkait antara praktik politik uang dan pergerakan sosial di lingkungan gereja.